

JURNAL

KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN

J. Kebijakan Sosial Ekonomi KP	Vol. 12	No. 2	Hal. 89 - 176	Jakarta Desember 2022	ISSN 2089-6980
--------------------------------	---------	-------	---------------	--------------------------	-------------------

Terakreditasi RISTEKDIKTI : **200/M/KPT/2020**

Diterbitkan bersama :



Balai Besar Riset Sosial Ekonomi
Kelautan dan Perikanan



Jaringan Riset Sosial Ekonomi
Kelautan dan Perikanan

JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN

Volume 12 Nomor 2, Desember 2022

Penanggung Jawab :

Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Dewan Redaksi :

Ketua:

Prof. Dr. Agus Heri Purnomo (*Ekonomi Sumber Daya*)

Anggota:

Prof. Dr. Harsuko Riniwati (*Sosial Ekonomi Perikanan*)

Prof. Dr. Ir. Ketut Sukiyono., DipAgEc. MEc, (*Ekonomi Pertanian*)

Dr. Armen Zulham (*Sistem Usaha Perikanan*)

Dr. Yonvitner, S.Pi, M.Si. (*Dinamika Populasi & Lingkungan Perairan dan Sumberdaya Perikanan*)

Dr. Rani Hafsaridewi, S.K.M., M.Si. (*Sistem Usaha Perikanan*)

Dr. Achmad Rizal (*Sosial Ekonomi Perikanan*)

Drs. Masyhuri Imron, MA (*Sosiologi*)

Redaksi Pelaksana :

Nila Mustika Wati, S.S.

Sinta Nurwijayanti, M.A.

Nendah Kurniasari, M.Si.

Rizki Aprilian Wijaya, M.T.

Freshty Yulia Arthatiani, M.Si

Heny Lestari, S.E.

Siti Nurhayati, S.Sos.

Rahadi Susetyo Friendly Muhammad, S.I.Kom.

Desain dan Tata Letak :

Ilham Ferbiansyah, S. Kom.

Alamat Redaksi :

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Gedung BRSDM KP Lt. 3

Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara

Telp. (021) 6471 1583, Faks.(021) 64700924

Email: kebijakan.rosek@gmail.com

Jurnal Online: <http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkse>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat RahmatNya telah diselesaikan Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Volume 12 Nomor 2 Tahun 2022. Jurnal ini telah terakreditasi berdasarkan Keputusan Kepala LIPI Nomor 1221/E/2016 tanggal 22 September 2016 dengan Sertifikat Akreditasi No. 758/Akred/P2MI-LIPI/08/2016. Jurnal ini merupakan pengembangan dari Jurnal Kebijakan dan Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan yg diterbitkan oleh Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, maka sejak tanggal 30 Maret 2017 terjadi perubahan nama nomenklatur organisasi dari Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan menjadi Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan.

Penerbitan jurnal ini didanai oleh Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Informasi yang ditampilkan meliputi: (i) Peran Negara Pelabuhan Berdasarkan Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia; (ii) Proteksionisme dan Standardisasi Garam Konsumsi Beryodium; (iii) Pelajaran Dari Pengelolaan Rantai Pasok Pada Masa Pandemi Covid-19 Oleh PT ASTB di Maluku Tengah; (iv) Perspektif Sosiokultural Nelayan Kedung Cowek Terhadap Pandemi Covid-19 di Surabaya; (v) Pelaksanaan Tradisi Petik Laut Nelayan Hindu dan Islam Dalam Korelasi Pengelolaan Sumber Daya Pesisir di Jembrana; (vi) Analisis Pemangku Kepentingan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Labuan untuk Peningkatan Perekonomian Masyarakat, dan; (vii) Pendekatan Kebijakan Keadilan Biru Untuk Pengelolaan Perikanan Skala Kecil di Kabupaten Natuna.

Dengan diterbitkannya jurnal ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang ada kepada masyarakat dan menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perikanan dan kelautan. Saran dan masukan dari pembaca sangat diharapkan guna kesempurnaan penerbitan jurnal ini dimasa mendatang.

Redaksi

UCAPAN TERIMA KASIH

Dewan Redaksi Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (JKSEKP) menyampaikan penghargaan dan terima kasih sebesar - besarnya kepada para Mitra Bestari yang telah berpartisipasi dalam menelaah naskah yang diterbitkan di jurnal ilmiah ini, sehingga jurnal ini dapat terbit tepat pada waktunya. Mitra Beestari yang berpartisipasi dalam terbitan Volume 12 Nomor 2, Desember 2022 adalah:

1. Prof. Dr. Sonny Koeshendrajana (*Ekonomi Sumber Daya - Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*)
2. Prof. Dr. Rilus A Kinseng (*Sosiologi Pedesaan Kebijakan - IPB University*)
3. Prof. Dra. Indah Susilowati, M.Sc. Ph.D (*Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan - Universitas Diponegoro*)
4. Achmad Zamroni, Ph.D (*Pengelolaan Wilayah Pesisir - Badan Riset Inovasi Nasional*)
5. Dr. Pujo Semedi Hargo Yuwono, M.A. (*Antropologi - Universitas Gadjah Mada*)
6. Dr. Irwan Muliawan (*Sistem Usaha Perikanan - Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*)
7. Dr. Ir. Duto Nugroho, M.Si. (*Ilmu perikanan Keanekaragaman Hayati Laut - Badan Riset Inovasi Nasional*)
8. Dr. Ir. Pudji Purwanti, MP (*Ekonomi Perikanan - Universitas Brawijaya*)
9. Dr. Ir. Siti Amanah, MSc (*Penyuluhan dan komunikasi aspek sosial - IPB University*)
10. Dr. Herlina Tarigan (*Sosiologi Pertanian - Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian*)
11. Dr. Ir. Edi Susilo, MS (*Sosiologi Perikanan - Universitas Brawijaya*)
12. Maulana Firdaus, Ph.D (*Sistem Usaha Perikanan - Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*)
13. Maharani Yulisti, Ph.D (*Sistem Usaha Perikanan - Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*)
14. Dr. Rudi Alek Wauhyudin (*Kebijakan Kelautan Perikanan - Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*)
15. Tenny Apriliani, M. Si (*Sistem Usaha Perikanan - Badan Riset Inovasi Nasional*)
16. Radityo Pramoda, S.H., S.E., M.M (*Sistem Usaha Perikanan - Badan Riset Inovasi Nasional*)
17. Drs. Kusnadi, M.A (*Antropolog Maritim - Universitas Jember*)
18. Hakim Miftakhul Huda, M. Si (*Sistem Usaha Perikanan - Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*)

JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN
Volume 12 Nomor 2, Tahun 2022

DAFTAR ISI	Halaman
KATA PENGANTAR	i
UCAPAN TERIMA KASIH	ii
DAFTAR ISI	iii
 Peran Negara Pelabuhan Berdasarkan Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia <i>Oleh : Akhmad Solihin, Darmawan, M Fedi A Sondita dan Ari Purbayanto</i>	89 - 100
 Proteksionisme dan Standardisasi Garam Konsumsi Beryodium <i>Oleh : Rahmadi Sunoko, Asep Saefuddin, Rizal Syarief dan Nimmi Zulbainarni</i>	101 - 111
 Pelajaran Dari Pengelolaan Rantai Pasok Pada Masa Pandemi Covid-19 Oleh PT ASTB di Maluku Tengah <i>Oleh : Iqlimah Rahmadina Duwila, Suadi dan Siti Ari Budhiyanti</i>	113 - 126
 Perspektif Sosiokultural Nelayan Kedung Cowek Terhadap Pandemi Covid-19 di Surabaya <i>Oleh : Praja Firdaus Nuryananda, Probo Darono Yakti dan Wulan Anggit Utami</i>	127 - 136
 Pelaksanaan Tradisi Petik Laut Nelayan Hindu dan Islam Dalam Korelasi Pengelolaan Sumber Daya Pesisir di Jembrana <i>Oleh : Heri Ariadi, Tholibah Mujtahidah dan Sri Hidayati</i>	137 - 144
 Analisis Pemangku Kepentingan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Labuan untuk Peningkatan Perekonomian Masyarakat <i>Oleh : Oki Oktaviana, Devi Triady Bachruddin dan Bani Adi Darma</i>	145 - 157
 Pendekatan Kebijakan Keadilan Biru Untuk Pengelolaan Perikanan Skala Kecil di Kabupaten Natuna <i>Oleh : Radityo Pramoda, Tenny Apriliani, Armen Zulbam, Riesti Triyanti dan Nurlaili</i>	159 - 169

Peran Negara Pelabuhan Berdasarkan Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia

Port State Role Based on International Law and its Implementation in Indonesia

Akhmad Solihin, Darmawan, M Fedi A Sondita dan Ari Purbayanto

ABSTRAK

Indonesia telah meratifikasi kesepakatan Agreement on Port State Measure to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing 2009 (PSMA 2009) pada tahun 2016. Kesepakatan internasional tersebut mewajibkan Indonesia untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum di pelabuhan-pelabuhan perikanan nasional. Kesiapan Indonesia sangat penting untuk dapat melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam kesepakatan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah (1) mengidentifikasi kewajiban-kewajiban yang dimuat dalam PSMA 2009 dan (2) memetakan pemenuhan kewajiban Indonesia yang dimuat dalam peraturan. Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis normatif dan yuridis komparatif. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat tujuh hal utama yang harus menjadi perhatian Indonesia, yaitu kewajiban penegakan hukum, kewajiban memperhatikan hukum internasional lain, kewajiban tukar informasi, kewajiban pelaksanaan pengelolaan konservasi dari organisasi pengelola perikanan regional, kewajiban penetapan pelabuhan perikanan, kewajiban kapasitas sumber daya untuk pemeriksaan dan pelatihan, dan kewajiban pemeriksaan. Salah satu kewajiban yang belum terpenuhi adalah kapasitas sumber daya manusia. Kewajiban lainnya sudah dimuat dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 39/Permen-KP/2019 tentang Pelaksanaan Ketentuan Negara Pelabuhan Untuk Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas Penangkapan Ikan secara Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur serta Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) Nomor 52/Kepmen-KP/2020 tentang Pelabuhan Tempat Pelaksanaan Ketentuan Negara Pelabuhan untuk Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas Penangkapan Ikan secara Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur.

Kata Kunci: IUU *fishing*; kesiapan regulasi Indonesia; pelabuhan perikanan; PSMA 2009

ABSTRACT

Indonesia has ratified the Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing 2009 (PSMA 2009) in 2016. The international agreement requires Indonesia to carry out surveillance and law enforcement at national fishing ports. Indonesia's readiness is crucial to carry out the obligations contained in the agreement. The aims of this study are (1) to identify the obligations contained in the 2009 PSMA; and (2) to map the fulfillment of Indonesia's obligations contained in the regulations. This research uses normative juridical and comparative juridical analysis methods. The results of this study reveal that there are seven main concerns of Indonesia, e.g. obligations to enforce the law, obligations to pay attention to other international laws, obligations to exchange information, obligations to implement conservation management from regional fisheries management organizations, obligations to determine fishing ports, obligations for human resource capacity for inspection and training, and inspection obligations. One of the obligations that has not been fulfilled is the capacity of human resources. Other obligations have been contained in the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries (Permen KP) Number 39/Permen-KP/2019 concerning the Implementation of Port State Provisions to Prevent, Deters, and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing and Decree of the Minister of Marine Affairs and Fisheries of Number 52/Kepmen-KP/2020 on the designation of Ports for the Implementation of Port State to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing.

Keywords: IUU *fishing*; Indonesian regulatory readiness; fishing ports; PSMA 2009

Proteksionisme dan Standardisasi Garam Konsumsi Beryodium

Protectionism and Iodized Food Salt Standardization

Rahmadi Sunoko, Asep Saefuddin, Rizal Syarif dan Nimmi Zulbainarni

ABSTRAK

Garam memiliki peranan penting sebagai bagian ekonomi masyarakat pesisir serta sejarah yang panjang, khususnya di wilayah pesisir Jawa dan Madura. Dalam praktik tata niaga, garam hasil produksi petambak garam dibeli oleh pedagang/produsen yang sebagian besar diolah untuk memenuhi pasar garam konsumsi beryodium dan kebutuhan garam bahan baku industri, seperti industri aneka pangan. Dengan melakukan pendekatan analisis deskriptif dan pengamatan langsung terhadap proses produksi garam dari bahan baku hingga menjadi produk olahan serta wawancara kepada petambak garam, pedagang garam, dan pengolah garam, penelitian ini mengeksplorasi lebih lanjut bagaimana praktik standardisasi garam konsumsi beryodium di Indonesia. Penelitian ini juga menganalisis kebijakan standardisasi garam konsumsi beryodium, apakah merupakan bagian dari proteksionisme atau tidak serta bagaimana pengaruhnya terhadap daya saing petambak garam dan industri kecil menengah (IKM) pengolah garam. Standardisasi garam konsumsi beryodium dengan kandungan NaCl >94% berada di bawah rekomendasi Codex (>97%). Implementasi SNI garam konsumsi beryodium merupakan contoh *pseudo-protectionism* dalam bentuk *under-standardization*. Kebijakan ini mampu memberikan pasar bagi produksi garam nasional dengan tetap menjunjung *fairness* dalam perdagangan global. Implikasi atas kebijakan ini mempertegas posisi pemerintah yang memiliki andil besar dalam rangka meningkatkan daya saing petambak garam dan industri kecil menengah (IKM) pengolah garam. Namun, *under-standardization* sebagai suatu bentuk proteksionisme tidak akan efektif ketika tidak terjadi peningkatan kualitas bahan baku garam di hulu. Kebijakan ini memiliki manfaat jangka pendek, tetapi tidak mampu menjadi katalis bagi peningkatan daya saing IKM pengolah garam dan petambak garam itu sendiri. Meskipun terdapat jaminan tersedianya pasar bagi garam produksi petambak garam nasional, itu tidak menjamin harga yang baik. Hal itu disebabkan oleh pasar garam konsumsi dan pengasinan ikan yang tidak mampu menyerap seluruh produksi nasional. Sementara itu, industri lainnya menggunakan garam impor yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan industrinya.

Kata Kunci: garam; standardisasi; proteksionisme; UMKM; daya saing

ABSTRACT

Salt has a significant role as a part of the coastal economy communities and has a long history, especially in coastal areas of Java dan Madura Islands. In commercial practice, solar salt is produced by farmers and delivered to the market as raw material. In the processing plant, solar salt is processed to be iodized food salt and to fulfill industry needed. By conducting a descriptive analysis approach and direct observation of the salt production process from raw materials to processed products as well as interviews with salt farmers, salt traders, and salt processors, this study aims to explore further how the practice of standardizing iodized food salt in Indonesia. This study also analyzes the policy of standardization of iodized consumption salt, whether it is part of protectionism or not and how it affects the competitiveness of salt farmers and small and medium industries (SMEs) for processing salt. The standardization of iodized consumption salt with NaCl content >94% is below the Codex recommendation (>97%). The implementation of the Indonesia National Standard (SNI) for iodized consumption salt is an example of *pseudo-protectionism* in the form of *under-standardization*. This policy can provide a market for national salt production while upholding fairness in global trade. The implication of this policy emphasizes the position of the government which has a major role in increasing the competitiveness of salt farmers and IKM for processing salt. However, *under-standardization* as a form of protectionism will not be effective if there is no improvement in the quality of salt raw materials upstream. This policy has short-term benefits but cannot be a catalyst for increasing the competitiveness of salt processing SMEs and salt farmers themselves. Although there is a guarantee that there will be a market available for salt produced by national salt farmers, it does not guarantee a good price. This is due to the market of iodized consumption salt and fish salting which are unable to absorb the entire national production. Meanwhile, on the other hand, other industries use imported salt according to the specifications of the industrial needs.

Keywords: solar salt; small medium enterprises; competitiveness; protectionism

Pelajaran Dari Pengelolaan Rantai Pasok Pada Masa Pandemi Covid-19 Oleh PT ASTB di Maluku Tengah

Lessons Learned From Skipjack Tuna Supply-Chain Management During the Covid-19 Pandemic by PT ASTB in Central Maluku

Iqlimah Rahmadina Duwila, Suadi dan Siti Ari Budhiyanti

ABSTRAK

Masa pandemi memunculkan berbagai permasalahan pada industri perikanan, salah satunya terkait isu ketersediaan, kualitas pasokan, dan pemasok bahan baku. Menyikapi hal itu, pelaku usaha melakukan upaya-upaya penanganan masalah, yang dituangkan dalam perbaikan pengelolaan rantai pasok untuk mendukung keberlangsungan usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi isu pengelolaan rantai pasok ikan cakalang pada masa pandemi Covid-19, mengidentifikasi model rantai pasok ikan cakalang mengukur kinerja rantai pasok ikan cakalang. Penelitian dilakukan melalui pendekatan studi kasus di PT ASTB Maluku Tengah pada bulan Januari-April 2021. Penelitian ini menggunakan data primer diperoleh melalui wawancara dengan responden yang ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* dan data sekunder diperoleh dari Dinas Kelautan Provinsi Maluku, Balai Karantina Ikan Provinsi Maluku dan informasi dari hasil-hasil penelitian terkait secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan metode SCOR dan AHP untuk menilai kinerja rantai pasok. Hasil penelitian menunjukkan hasil-hasil sebagai berikut: (i) aliran barang di PT ASTB bersumber dari pemasok yang berada di wilayah Maluku, (ii) transaksi finansial antara pelaku usaha dilakukan secara tunai atau transfer, dengan sistem relasi berbasis kepercayaan tanpa piutang, (iii) aliran informasi mengalir dari dan ke pemasok di PT ASTB terjadi melalui layanan telpon atau *whatsapp*, (iv) pandemi Covid-19 tidak menghentikan bisnis ikan cakalang beku (*frozen*) PT ASTB, (v) pelaku rantai pasok ikan cakalang terdiri dari pemasok, pengolah dan konsumen dalam Maluku (pasar lokal, tradisional dan domestik) dan luar Maluku (ekspor), (vi) kinerja rantai pasok ikan cakalang PT ASTB dikategorikan sebagai "Baik/Good". Perusahaan dapat lebih baik lagi (*from good to excellent*) dengan melakukan upaya peningkatan kinerja rantai pasok yang memprioritaskan perbaikan pada kriteria terendah yaitu *return*.

Kata Kunci: ikan cakalang; pengukuran kinerja; industri perikanan; COVID-19; pandemi; SCOR; AHP

ABSTRACT

The pandemic period raises various problems in the fishing industry, one of which is related to issues of availability, quality of supply, and suppliers of raw materials. In response to this, business actors make efforts to handle problems, which are outlined in improving supply chain management to support business continuity. This study aims to identify the issue of skipjack supply chain management during the Covid-19 pandemic, identify the skipjack supply chain model and, measure the performance of the skipjack supply chain. The research was conducted through a case study approach at PT ASTB in January-April 2021. This study used primary data obtained through interviews with respondents who were determined using purposive sampling technique and secondary data obtained from the Maluku Provincial Marine Service, Maluku Provincial Fish Quarantine Center and information from research results related descriptively qualitatively and quantitatively with SCOR and AHP methods to assess supply chain performance. The results of the study show the following results: (i) the flow of goods at PT ASTB comes from suppliers located in the Maluku region, (ii) financial transactions between business actors are carried out in cash or transfers, with a trust-based relationship system without debt and credit, (iii) the flow of information to and from suppliers at PT ASTB occurs via telephone or whatsapp services, (iv) the Covid-19 pandemic has not stopped PT ASTB frozen tuna business, (v) the actors in the skipjack supply chain consist of suppliers, processors and consumers in Maluku (local, traditional and domestic markets) and outside Maluku (exports), (vi) PT ASTB supply chain performance of skipjack tuna is categorized as "Good". Companies can do better (from good to excellent) by making efforts to improve supply chain performance that prioritizes improvements on the lowest criterion, namely *return*.

Keywords: skipjack tuna; performance measurement; fishing industry; COVID-19; pandemic; SCOR; AHP

Perspektif Sosiokultural Nelayan Kedung Cowek Terhadap Pandemi Covid-19 di Surabaya

Sociocultural Perspective of Fishermen Community in Kedung Cowek on Covid-19 Pandemic In Surabaya

Praja Firdaus Nuryananda, Probo Darono Yakti dan Wulan Anggit Utami

ABSTRAK

Selepas periode puncak pandemi Covid-19, pemerintah menghimbau masyarakat untuk segera kembali pada kehidupan normal dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Himbauan dikeluarkan menyusul masa-masa sulit di mana selama 1,5 tahun pergerakan masyarakat terkendala oleh kebijakan pemerintah yang membatasi kegiatan ekonomi dan sosial. Dengan aktivitas sosial dan ekonomi yang sangat masif di masa normal dan karenanya mengalami tekanan yang signifikan pada masa pandemi, kasus komunitas nelayan Kedung Cowek di Kota Surabaya memberi pelajaran baik untuk penerapan kebijakan serupa di masa yang akan datang. Dengan latar belakang tersebut, penelitian bertujuan menganalisis situasi kehidupan sosial ekonomi masyarakat pesisir Kedung Cowek terkait dengan pandemi dilihat dari perpektif sosiokultural. Penelitian dilakukan pada tahun 2021 menggunakan metodologi kualitatif, yang menerapkan analisis data etnografi dan mengacu pada kerangka pemikiran trinitas strategi Carl von Clausewitz dan etnografi baru James Spradley. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat yang terdiri atas pejabat pemerintah kelurahan, komunitas nelayan, dan masyarakat umum di lokasi penelitian. Hasil penelitian ini menemukan bahwa: (1) pandemi tidak mengubah cara pandang dan perilaku masyarakat nelayan terkait ekonomi dan lingkungan; nelayan tetap melaut meskipun ada himbauan pembatasan, (2) terjadi fenomena resistensi masyarakat terhadap himbauan pembatasan kegiatan terkait pandemi Covid-19, dan (3) masyarakat nelayan memiliki resiliensi sosiokultural yang menyebabkan pandemi tidak terpengaruh secara fundamental. Implikasi kebijakan dari penelitian ini pentingnya memandang perpektif sosiokultural masyarakat sebagai sebuah aspek penting yang karenanya perlu diakomodasikan sebagai salah satu pertimbangan utama dalam penerapan kebijakan terkait kondisi kebencanaan seperti terjadi pada masa pandemi Covid-19.

Kata Kunci: pandemi Covid-19; komunitas nelayan; ekonomi; sosial; Kedung Cowek

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic has become a new challenge for businesses and communities around the world. In particular, the community is encouraged to resume their activities to support the post-pandemic economic recovery program. This advisory was issued after almost one and a half years the community was asked to limit many activities, especially economic and social activities. Kedung Cowek fishermen in Surabaya City are an example of a fishing community facing post-pandemic socioeconomic recovery. This study aims to 1) describe the economic activities of coastal communities during a pandemic and 2) their interactions with market traders during a pandemic. This study uses a qualitative methodology by analyzing ethnographic data taken from primary data sources through in-depth interviews with community leaders consisting of village government officials, fishing communities and the general public in Kedung Cowek Village. The analysis was carried out using the strategic trinity framework by Carl von Clausewitz and the new ethnography by James Spradley. This research was conducted in 2021 in Kedung Cowek Village, Surabaya City, as the center of the fishing community in Surabaya City. The results of this study found that (1) the pandemic did not change the perspective and behavior of the fishing village community towards the economy, as well as environmental cleanliness so that they continued to go to sea despite the call for restrictions and (2) there is a phenomenon of community resistance to the call for restrictions on activities related to the Covid-19 pandemic which is indicated by the characteristics of fishing communities who have sociocultural resilience so that they are not fundamentally affected. This case study leads to the conclusion that Covid-19 does not have a significant influence on the social behavior of the fishing community in Kedung Cowek Village in Surabaya.

Keywords: Covid-19 pandemic; fishermen community; economy; social; Kedung Cowek

Pelaksanaan Tradisi Petik Laut Nelayan Hindu dan Islam Dalam Korelasi Pengelolaan Sumber Daya Pesisir di Jembrana

Implementation of The Petik Laut Tradition on Hindu and Islamic Fishers with Correlation of Coastal Resource Management in Jembrana

Heri Ariadi, Tholibah Mujtahidah dan Sri Hidayati

ABSTRAK

Petik laut adalah tradisi kebudayaan masyarakat nelayan di pesisir Jembrana, Bali. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola perbedaan pelaksanaan tradisi petik laut antara nelayan yang beragama Hindu dan nelayan yang beragama Islam di Jembrana Bali serta pola kebijakan di wilayah pesisir yang dapat dibuat berdasarkan adanya akulturasi budaya tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengambilan data berdasarkan wawancara mendalam (*deep interview*) dan pemberian kuesioner kepada 20 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan tradisi petik laut oleh nelayan yang beragama Hindu dan nelayan yang beragama Islam adalah mirip. Nelayan Hindu melaksanakan tradisi petik laut berdasarkan pada keyakinan *pancasradha* selama 3 hari yang berlandaskan pada *tattwa*, susila, dan upacara. Nelayan Islam melaksanakan tradisi petik laut didasarkan keyakinan iman kepada Tuhan selama 3 hari yang diiringi dengan pembuatan larung sesaji. Tradisi petik laut merupakan hasil akulturasi budaya yang ada sejak zaman nenek moyang sebagai cara bersyukur dan memohon berkah kepada Tuhan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pola pelaksanaan tradisi petik laut antara nelayan yang beragama Hindu dan Islam terletak dari pada teknis pelaksanaan tradisi yang akan memberikan corak perbedaan. Tradisi petik laut di Jembrana yang berlangsung turun-temurun dapat memberikan fondasi kebijakan berupa (1) sebagai landasan dasar penyusunan peraturan daerah tentang pengelolaan pesisir yang berbasis pada budaya masyarakat, (2) landasan religius tradisi petik laut dapat dijadikan sebagai visi pengelolaan sumber daya pesisir yang lestari, dan (3) tradisi petik laut yang dijalankan oleh agama Hindu dan Islam dapat dijadikan sebagai opsi pengembangan *cultural tourism*s bagi pemerintah daerah setempat.

Kata Kunci: upacara; toleransi; keyakinan; umat; pesisir

ABSTRACT

Petik Laut is a cultural tradition of the fishing community on the coast of Jembrana, Bali. The purpose of this study was to determine the pattern of differences in the process of implementing the petik laut tradition between Hindu fishermen and Muslim fishermen in Jembrana Bali and the pattern of policies in coastal areas that can be made from this cultural acculturation. The research method used in this research is descriptive qualitative with data collection techniques based on deep interviews and giving questionnaires to 20 respondents. The results show that the implementation of the petik laut tradition by Hindu fishermen and Muslim fishermen is similar. Hindu fishermen carry out the petik laut tradition based on the five-day faith of five days, based on tattwa, morals, and ceremonies. Islamic fishermen carry out the petik laut tradition based on faith in God for 3 days accompanied by making offerings. The petik laut tradition is the result of cultural acculturation that has existed since the time of the ancestors as a way of giving thanks and asking God for blessings. The results of the study concluded that the pattern of implementing of petik laut tradition between Hindu and Muslim fishermen lies in the technical implementation of the tradition which will give a different style. The petik laut tradition in Jembrana which has been passed down from generation to generation can provide policy foundations in the form of (1) the basis for the preparation of regional regulations on coastal management based on community culture, (2) the religious foundation of the petik laut tradition can be used as a vision for sustainable coastal resource management, (3) the petik laut tradition carried out by Hinduism and Islam can be used as an option for developing cultural tourism for the local government.

Keywords: ceremony; tolerance; belief; people; coastal

**Analisis Pemangku Kepentingan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Labuan untuk Peningkatan
Perekonomian Masyarakat**

Stakeholders Analysis for the Development of Labuan Fishery Port to Improve Economy of the Community

Oki Oktaviana, Devi Triady Bachruddin dan Bani Adi Darma

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan melakukan optimalisasi keberadaan Pelabuhan Perikanan Labuan agar dapat menjadi pengungkit perekonomian daerah. Penelitian dilakukan pada bulan September sampai dengan November 2021 dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif (*mix method*). Pengumpulan data primer yang terkait dengan persepsi setiap pemangku kepentingan (*stakeholder*) dilakukan melalui wawancara dan diskusi kelompok terpusat (*focus group discussion*), sedangkan analisis data menggunakan *MACTOR* (*matrix of alliance, conflicts, tactics, objectives and recommendations*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sebelas pemangku kepentingan yang berperan dalam pengembangan Pelabuhan Perikanan Labuan dengan empat pemangku kepentingan di antaranya, yakni UPTD PPP, nelayan, pengelola TPI, dan kelompok pengolah hasil perikanan, memiliki tingkat ketergantungan serta tingkat pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pengembangan Pelabuhan Perikanan Labuan. Seluruh pemangku kepentingan bersepakat bahwa tujuan pengembangan pelabuhan perikanan diarahkan pada peningkatan peran UPTD PPP dalam pencapaian tujuan pembangunan, keamanan dan keselamatan pelayaran, peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan pendapatan desa, dan fasilitasi bagi nelayan. Keberadaan pedagang kaki lima di wilayah pelabuhan akan menimbulkan permasalahan jika tidak dikelola dengan baik. Rekomendasi yang diberikan adalah perlunya optimalisasi peran seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan pengembangan Pelabuhan Perikanan Labuan, sinkronisasi program kerja dari seluruh pemangku kepentingan untuk mengembangkan pelabuhan perikanan di Labuan agar tujuan pengembangannya tercapai dan memberikan manfaat bagi masyarakat, serta perlunya pelibatan institusi desa melalui pengadaan lahan bagi pedagang kaki lima agar keberadaannya tidak mengganggu fungsi pelabuhan.

Kata Kunci: pelabuhan perikanan; Labuan; Banten; analisis pemangku kepentingan; MACTOR

ABSTRACT

This study aims to optimize the existence of the Labuan Fishing Port so that can be leveraged for the regional economy. This research was conducted from September to November 2021 with a qualitative and quantitative method approach (mix method). Primary data collection related to the perception of each stakeholder is carried out through interviews and focus group discussions while data analysis used MACTOR (matrix of alliance, conflicts, tactics, objectives and recommendations) to see the role of stakeholders in achieving outcomes directly or indirectly. The results showed that there were eleven stakeholders who played a role in the development of the Labuan Fishery Port and four of them, namely UPTD PPP, fishermen, TPI managers and fishery product processing groups, had a high level of dependence and a strong level of influence on the success of fishing port development. All stakeholders agree that the purpose of developing fishing ports is directed at increasing the role of UPTD PPP in achieving development goals, shipping security and safety, improvement of the community's economy, increase in village income and fisherman facilitation. The existence of street vendors in the port area will cause problems if not managed properly. The recommendations given are the need to optimize the role of all relevant stakeholders in the development of the Labuan Fishing Port, to synchronize the work programs of all stakeholders to develop a fishing port in Labuan so that its development goals are achieved and provide benefits to the community and the need to involve village institutions through land acquisition for street vendors in the port area.

Keywords: fishing port; Labuan; Banten; analysis stakeholders; MACTOR analysis

Pendekatan Kebijakan Keadilan Biru Untuk Pengelolaan Perikanan Skala Kecil di Kabupaten Natuna

Blue Justice Policy Approach for Small-Scale Fishery Management in Natuna Regency

Radityo Pramoda, Tenny Apriliani, Armen Zulham, Riesti Triyanti dan Nurlaili

ABSTRAK

Membangun keadilan biru terhadap pertumbuhan ekonomi laut yang berkelanjutan, merupakan salah satu kebijakan penting dalam rangka menyejahterakan nelayan skala kecil. Nelayan skala kecil di Kabupaten Natuna menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dinamika kewilayahan maupun ekosistem sebagai media hidup sumber daya ikan. Kajian ini memiliki kebaruan pada materi pembahasan yang mengambil tema keadilan biru, karena pada skala nasional masih sangat jarang dijadikan sebagai topik penelitian. Berdasarkan hal itu, tujuan penelitian ini adalah memberikan gambaran secara komprehensif tentang kebijakan pemanfaatan potensi perikanan nelayan skala kecil di Kabupaten Natuna melalui 10 indikator pendekatan keadilan biru. Penelitian kualitatif ini dianalisis menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus dan dijabarkan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator keadilan biru yang perlu diperbaiki diantaranya: 1) perampasan, pemindahan, dan perebutan laut; 2) degradasi lingkungan dan pengurangan ketersediaan jasa ekosistem; 3) dampak mata pencaharian nelayan kecil; 4) marginalisasi perempuan. Implikasi kebijakan kajian ini memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk: 1) menambah jumlah personel pengawas dan armada kapalnya; 2) membentuk tim khusus yang mengawasi pasokan dan penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi kebutuhan operasional nelayan skala kecil; 3) melaksanakan pengawasan terpadu dan mengaktifkan kembali fungsi kelompok masyarakat pengawas; 4) melakukan pendekatan dan sosialisasi dalam rangka meningkatkan pendidikan formal kaum perempuan sebagai upaya menciptakan kesetaraan gender.

Kata Kunci: kebijakan; pengelolaan perikanan; nelayan skala kecil; Kabupaten Natuna; keadilan biru

ABSTRACT

Developing blue justice for sustainable marine economic growth is one of the important policies in the context of the welfare for small-scale fishers. Small-scale fishers in Natuna Regency becomes is become an inseparable unit with the regional dynamics and ecosystems as a fish resource living media. This study has novelty in the discussion material that takes the theme of blue justice, because on a national scale it is still very rarely used as a research topic. Based on that, this study aim examine the policy of exploiting the potential of small-scale fishers in the Natuna Regency through 10 blue justice approach indicators. This qualitative research analyzes by empirical juridical methods with a case study and descriptive approach. The results show that equity indicators need to be improved: 1) dispossession, displacement, and ocean grabbing; 2) environmental degradation and reduction of availability of ecosystem services; 3) livelihood impacts for small-scale fishers; 4) marginalization of women. The policy implications of this study provide recommendations to the central government and local governments to: 1) increase the number of supervisory personnel and their fleet of ships; 2) establish a special team that oversees the supply and distribution of subsidized fuel oil for the operational needs of small-scale fishers; 3) carry out integrated supervision and reactivate the function of the supervisory community group; 4) approach and socialize in order to improve women's formal education as an effort to create gender equality.

Keywords: policy, fisheries management, small scale fishers, Natuna Regency, blue justice

JUDUL MAKALAH DITULIS DENGAN HURUF KAPITAL TEBAL SECARA SINGKAT DAN JELAS, (Studi Kasus: apabila ada)

(12 pt, Arial Bold)

Judul Bahasa Indonesia

Judul Dibuat Dalam 2 Bahasa (Indonesia dan Inggris),

(12 pt Arial Bold)

Judul Bahasa Inggris

Penulis Pertama¹, Penulis Kedua², dstⁿ ← (Nama Penulis Tanpa gelar)

¹Instansi Penulis Pertama dan ²Instansi Penulis Kedua

dstⁿ:....

(10pt, Arial))

e-mail: e-mail penulis pertama ← (berwarna hitam)

(10pt, Arial)

(9 pt, Arial)

ABSTRAK

Ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, tidak lebih dari 250 kata dan hanya satu paragraf. Abstrak memberikan informasi singkat namun jelas tentang alasan penelitian dilakukan, tujuan yang ingin dicapai, metode yang digunakan, hasil yang diperoleh serta sintesa pokok pembahasan dan implikasi kebijakan. ditulis dengan huruf Arial, 10 pt, spasi antar baris 1.0.

Kata kunci: *panduan; penulis; jurnal* ← (minimal 5 kata kunci)

ABSTRACT

Written in Indonesian and English, no more than 250 words and only one paragraph. The abstract provides brief but clear information about the reason the study was conducted, the objectives to be achieved, the method used, the results obtained and the synthesis of discussion points and policy implications. Written in Arial, 10 pt, line and paragraph spacing 1.0.

Keywords: *guidence; author; journal* ← (minimal 5 keywords)

PENDAHULUAN

Pendahuluan sebaiknya dimulai dengan **menjelaskan arti penting, pernyataan masalah, tujuan, metoda yang digunakan yang dibuat secara ringkas**. Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia. Naskah diketik dalam Microsoft Word dengan 1 kolom. Ukuran kertas A4 dengan ukuran panjang (*height*) 29,7 cm, lebar (*width*) 21 cm dengan dimensi *Top* 3 cm, *Bottom* 3 cm, *Right* 2,5 cm, *Left* 2,5 cm, *Gutter* 1 cm. Jenis Huruf Arial 11 pt, dan spasi (*line spacing*) 1,5 dan naskah **maksimal 25 halaman**. Pada bagian ini memuat justifikasi arti penting dari topik yang diangkat, state of the art dari topik tersebut (apa fakta yang sudah ada ataupun hasil-hasil riset terdahulu, apa yang seharusnya ada dan apa yang masih menjadi isu dan permasalahan, tujuan penulisan topik tersebut diikuti dengan metodologi yang digunakan dalam penelitian tersebut (kapan penelitian dilakukan, dimana, metoda apa yang digunakan serta data digunakan serta metoda analisisnya.

POKOK PEMBAHASAN I**POKOK PEMBAHASAN II**

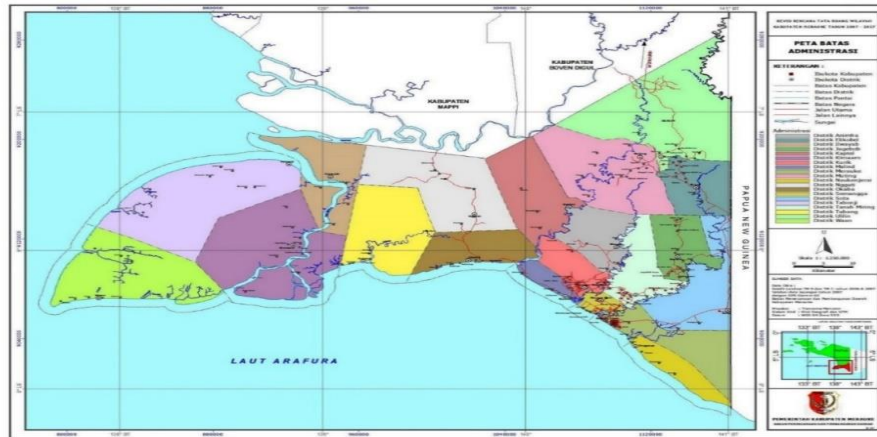
Bagian ini menyuguhkan data dan informasi yang ditemukan peneliti serta dipakai sebagai dasar penyimpulan bahkan penyusunan teori baru. Secara umum disuguhkan secara bertahap dalam tiga bagian: uraian temuan data dan informasi yang terkumpul. Sertakan data pendukung yang berupa tabel, grafik dan gambar seperlunya untuk memperjelas dan mempersingkat uraian yang harus diberikan. Tabel dibuat ringkas dan diberi judul yang singkat tetapi jelas hanya menyaji-kan data yang esensial dan mudah dipahami. Tabel diberi catatan secukup-nya, termasuk sumbernya, sehingga tabel mampu menjelaskan informasi yang disajikan secara mandiri. **Setiap tabel diberi nomor secara berurutan dan diulas di dalam naskah. Judul tabel diketik dengan jenis huruf Arial 10 pt, 9 pt pada bagian sumber dan pada tulisan “Tabel 1.” “Tabel 2.” dan seterusnya diketik tebal. Tabel menggunakan 2 (dua) Bahasa wajib, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.** Tabel tidak boleh dalam bentuk gambar berupa file jpg, png, image dan harus dalam bentuk tabel yang dibuat di Microsoft word. Judul tabel dituliskan pada bagian atas tabel, rata kiri dan diberi tanda titik (.) pada akhir judul tabel.

Gambar, Grafik dan Foto harus tajam dan jelas agar cetakan berkualitas baik serta memiliki sumber dimana file tersebut diambil atau proses didapatnya data tersebut. Semua simbol di dalamnya harus dijelaskan. Seperti halnya tabel, keterangan pada gambar, grafik dan foto harus mencukupi agar tersaji secara mandiri. Gambar, grafik dan foto harus diulas di dalam naskah. Seluruh keterangan yang terdapat pada Gambar, Grafik, dan Foto wajib untuk menggunakan dua bahasa seperti pada tabel, yaitu bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Gambar, grafik dan foto memiliki kedalaman minimal 300 dpi.

Tabel 1. Total Nilai Ekonomi Mangrove di Wilayah Pesisir Kabupaten Merauke.

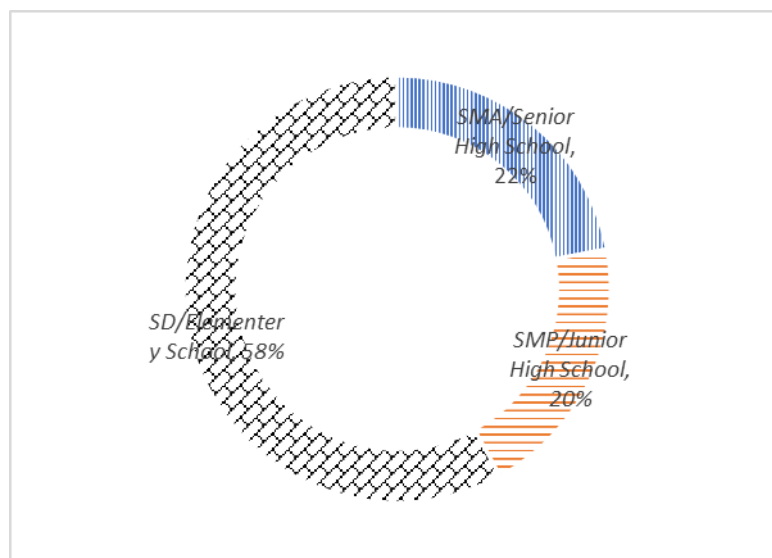
Table 1. The Total Economic Value Mangrove Coastal Merauke.

Kategori Nilai Ekonomi/ Category Economic Value	Total Nilai/ Total value (Rp/Tahun)	Total Nilai/ Total value (Rp/Ha/Tahun)
Nilai Guna Langsung/ <i>direct value</i>	121,120,873,947	11,964,919
Nilai Guna Tidak Langsung/ <i>Indirect Value</i>	48,361,817,303,4	4,777,419
Nilai Pewarisan/ <i>Value Inheritance</i>	2,728,107,120	269,496
Total/ Total	177,419,407,910	17,528,367



Gambar 1. Lokasi Pengambilan Data
Figure 1. Location Data Collection

Sumber: www.merauke.go.id/Source: www.merauke.go.id



Gambar 2. Kerangka Modal Sosial
Figure 2. Framework of Social Capital

SINTESA POKOK BAHASAN 1., n. (Sintesa Kebijakan)

Sintesa merupakan hasil dari gabungan pokok-pokok bahasan sehingga memberikan kesatuan analisis yang selaras berupa kebijakan yang disarankan. Sintesa diuraikan secara ringkas dan jelas mengacu pada pokok-pokok pembahasan serta kemampuan mengartikulasikan temuan. Sintesa yang menjawab pada setiap pokok pembahasan, ditulis secara singkat dan jelas dalam beberapa kalimat pada intinya menegaskan apakah tujuan penelitian ini sudah tercapai atau masih ada hal-hal yang belum dicapai. Jika belum, jelaskan apa penyebabnya.

IMPLIKASI KEBIJAKAN

Pada bagian ini peneliti menyajikan kesimpulan berupa kebijakan yang disarankan serta implikasinya. Implikasi kebijakan merupakan saran dari penulis apa yang harus dilakukan oleh penentu kebijakan agar kebijakan yang disarankan tersebut dapat terlaksana. Format implikasi kebijakan harus berupa paragraf, tidak diperkenankan berupa *pointer* atau *numbering*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan Terima Kasih Ditulis dengan formal, ucapan diberikan pihak tertentu, misalnya Sponsor penelitian, nama yang benar-benar terlibat dalam pelaksanaan penelitian dan ucapan tidak terlalu berlebihan.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Pernyataan status terkait kontributor penulis (perlu dijelaskan status kontributor Utama dan Anggota) dan juga telah melampirkan surat pernyataan kontribusi penulis.

DAFTAR PUSTAKA

KETENTUAN SITASI DAN DAFTAR PUSTAKA MENGGUNAKAN APA STYLE 7TH EDITION

American Psychological Association (APA) Style merupakan pedoman dalam melakukan kutipan dan daftar pustaka yang banyak diterima di bidang sosial dan ekonomi. Kutipan dilakukan dalam naskah dengan memasukkan nama penulis dan tahun publikasi. Kutipan dijelaskan secara detail daftar pustaka yang diletakkan pada akhir setiap naskah. Berikut detail cara melakukan kutipan pada naskah dan daftar pustaka:

1. Kutipan pada naskah berdasarkan tipe penulis

Tipe Penulis	Kutipan Naratif (Awal/Tengah Kalimat)	Kutipan dalam Kurung (Akhir Kalimat)
Satu penulis	Gonzalez (2019)	(Gonzalez, 2019)
Dua penulis	Gonzalez dan Jones (2019)	(Gonzalez & Jones, 2019)
Tiga penulis atau lebih	Gonzalez <i>et. al.</i> (2019)	(Gonzalez <i>et al.</i> , 2019)
Penulis bersama	Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang Dalam Angka 2021 (BPS Kabupaten Semarang Dalam Angka, 2021)	(Badan Pusat Statistik [BPS] Kabupaten Semarang Dalam Angka, 2021)

Tipe Penulis	Kutipan Naratif (Awal/Tengah Kalimat)	Kutipan dalam Kurung (Akhir Kalimat)
Kutipan berikutnya	BPS Kabupaten Semarang Dalam Angka (2021)	(BPS Kabupaten Semarang Dalam Angka, 2021)
Kutipan dari naskah lain	Seidenberg dan McClelland (dikutip dalam Coltheart, Curtis, Atkins, & Haller, 1993)	(Seidenberg dan McClelland [dikutip dalam Coltheart, Curtis, Atkins, & Haller, 1993])

Contoh penerapan kutipan dalam naskah dan daftar pustaka:

a. Kutipan dalam naskah

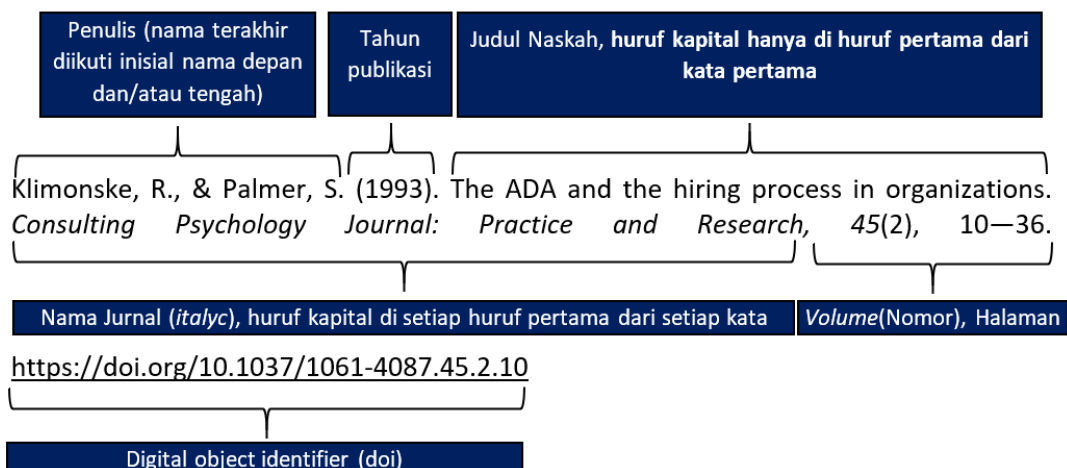
- Sesuai dengan Smith (1998), APA style adalah format kutipan yang mudah digunakan.
- APA style adalah format kutipan yang mudah digunakan (Smith, 1998).
- Menurut penelitian Seidenberg dan McClelland (dikutip dalam Coltheart, Curtis, Atkins, & Haller, 1993), keterampilan membaca dengan lantang tidak dapat dijelaskan oleh model apa pun kecuali model tersebut memiliki arsitektur jalur ganda.

b. Daftar pustaka

- Smith, P. (1998). Learning to cite using APA Style. *Journal of College Writing*, 6, 60513.
- Coltheart, M., Curtis, B., Atkins, P., & Haller, M. (1993). Models of reading aloud: dual-route and parallel-distributed-processing approaches. *Psychological Review*, 100(4), 589—608. <http://dx.doi.org/10.1037/0033-295X.100.4.589>

2. Artikel Jurnal

Format Penulisan Daftar Pustaka



Yang perlu diperhatikan dalam penulisan daftar pustaka:

- Nama penulis yang ditulis adalah nama belakang dulu, diikuti dengan inisial nama depan dan/atau tengah).
- Huruf yang harus diketik miring adalah “nama jurnal” dan “volume jurnal”. Sedangkan nomor jurnal diketik dengan format huruf tegak.
- Link DOI harus dapat dibuka (diawali dengan <https://doi.org/>).
- Penulisan DOI tidak diakhiri dengan tanda “titik”.

Contoh Penulisan Kutipan dan Daftar Pustaka serta Ketentuan dalam Penulisannya

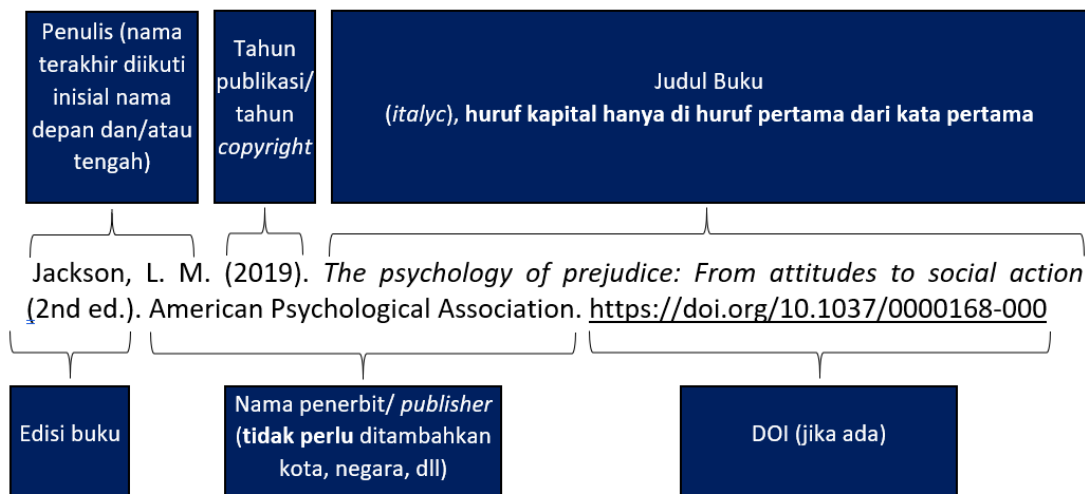
Grady, J. S., Her, M., Moreno, G., Perez, C., & Yelinek, J. (2019). Emotions in storybooks: A comparison of storybooks that represent ethnic and racial groups in the United States. *Psychology of Popular Media Culture*, 8(3), 207—217. <https://doi.org/10.1037/ppm0000185>

- Kutipan dalam kurung: (Grady et al., 2019)
- Kutipan naratif: Grady et al. (2019)

*) Menggunakan et al. karena jumlah penulis lebih dari 2 penulis

3. Buku

Format Penulisan Daftar Pustaka



Contoh Penulisan Kutipan dan Daftar Pustaka serta Ketentuan dalam Penulisannya

a. Buku dengan penulis

Jackson, L. M. (2019). *The psychology of prejudice: From attitudes to social action* (2nd ed.). American Psychological Association. <https://doi.org/10.1037/0000168-000>

Sapolsky, R. M. (2017). *Behave: The biology of humans at our best and worst*. Penguin Books.

Svendsen, S., & Løber, L. (2020). *The big picture/Academic writing: The one-hour guide* (3rd digital ed.). Hans Reitzel Forlag. <https://thebigpicture-academicwriting.digi.hansreitzel.dk/>

- Kutipan dalam kurung: (Jackson, 2019; Sapolsky, 2017; Svendsen & Løber, 2020)
- Kutipan naratif: Jackson (2019), Sapolsky (2017), serta Svendsen dan Løber (2020)

Ketentuan tambahan:

- Gunakan tahun copyright pada buku sebagai tahun publikasi.
- Edisi dituliskan setelah judul buku.
- Jangan tambahkan lokasi (kota dan negara) dari penerbit/publisher.

b. Buku yang sudah di-edit oleh Editor

Hygum, E., & Pedersen, P. M. (Eds.). (2010). *Early childhood education: Values and practices in Denmark*. Hans Reitzels Forlag. <https://earlychildhoodeducation.digi.hansreitzel.dk/>

Kesharwani, P. (Ed.). (2020). *Nanotechnology based approaches for tuberculosis treatment*. Academic Press.

Torino, G. C., Rivera, D. P., Capodilupo, C. M., Nadal, K. L., & Sue, D. W. (Eds.). (2019). *Microaggression theory: Influence and implications*. John Wiley & Sons. <https://doi.org/10.1002/9781119466642>

- Kutipan dalam kurung: (Hygum & Pedersen, 2010; Kesharwani, 2020; Torino et al., 2019)
- Kutipan naratif: Hygum and Pedersen (2010), Kesharwani (2020), dan Torino et al. (2019)

Ketentuan tambahan:

- Gunakan singkatan "(Ed.)" untuk satu editor dan gunakan singkatan "(Eds.)" untuk editor lebih dari satu.
- Jangan tambahkan lokasi (kota dan negara) dari penerbit/publisher.

c. Buku yang dipublikasi ulang dengan Editor

Watson, J. B., & Rayner, R. (2013). Conditioned emotional reactions: The case of Little Albert (D. Webb, Ed.). CreateSpace Independent Publishing Platform. <http://a.co/06Se6Na> (Publikasi awal tahun 1920)

- Kutipan dalam kurung: (Watson & Rayner, 1920/2013)
- Kutipan naratif: Watson dan Rayner (1920/2013)

Keterangan tambahan:

- Daftar pustaka tersebut menunjukkan bahwa penulis buku adalah Watson dan Rayner serta pertama kali dipublikasikan pada tahun 1920. Buku ini diedit oleh Editor yang bernama Webb, dan dipublikasikan ulang pada tahun 2013.

4. Laporan pemerintah (laporan teknis, laporan periodik, dll)

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muaro Jambi. (2018). Buku statistik perikanan tahun 2018. Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi.

- Kutipan dalam kurung: (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muaro Jambi, 2019)
- Kutipan naratif: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muaro Jambi (2019)

National Cancer Institute. (2019). Taking time: Support for people with cancer (NIH Publication No. 18-2059). U.S. Department of Health and Human Services, National Institutes of Health. <https://www.cancer.gov/publications/patient-education/takingtime.pdf>

- Kutipan dalam kurung: (National Cancer Institute, 2019)
- Kutipan naratif: National Cancer Institute (2019)

5. Prosiding

Bedenel, A. L., Jourdan, L., & Biernacki, C. (2019). Probability estimation by an adapted genetic algorithm in web insurance. Dalam R. Battiti, M. Brunato, I. Kotsireas, & P. Pardalos (Eds.), *Lecture notes in computer science: Vol. 11353. Learning and intelligent optimization* (pp. 225–240). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-05348-2_21

- Kutipan dalam kurung: (Bedenel et al., 2019)
- Kutipan naratif: Bedenel et al. (2019)

Keterangan tambahan:

- Penulis prosiding bernama Bedenel, Jourdan, dan Biernacki.
- Judul naskah adalah “Probability estimation by an adapted genetic algorithm in web insurance”.
- Editor prosiding adalah Battiti, Brunato, Kotsireas, dan Pardalos.
- Judul Buku Series adalah “Lecture notes in computer science”.
- Tema prosiding adalah “Learning and intelligent optimization”.

6. Disertasi, Tesis, dan Skripsi

a. Disertasi, Tesis, dan Skripsi yang dipublikasikan

Sulistiyanto, T. I. (2013). Identifikasi tingkat kerentanan petani di kawasan rawan genangan banjir melalui pendekatan sustainable livelihoods (Studi kasus: Desa Bulung Cangkring, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus) [Skripsi, Universitas Negeri Semarang]. UNNES Repository. <https://lib.unnes.ac.id/19960/1/3250408008.pdf>

- Kutipan dalam kurung: (Sulistiyanto, 2013)
- Kutipan naratif: Sulistiyanto (2013)

b. Disertasi, Tesis, dan Skripsi yang tidak dipublikasikan

Wiramiharja, Y. (2017). Analisis keberlanjutan budidaya ikan patin (pangasius hypophthalmus) dalam pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi [Tesis]. Universitas Terbuka.

- Kutipan dalam kurung: (Wiramiharja, 2017)
- Kutipan naratif: Wiramiharja (2017)

7. Artikel di Koran/Surat Kabar

a. Terdapat nama penulis

Sari, S. M. (2018, 11 April). Impor dari Vietnam dihentikan, produksi ikan patin meningkat. Bisnis.com. <http://m.bisnis.com/amp/read/20180411/99/783179/impor-dari-vietnam-dihentikan-produksi-ikan-patin-meningkat>

- Kutipan dalam kurung: (Sari, 2018)
- Kutipan naratif: Sari (2018)

Keterangan tambahan:

- Masukkan tanggal, bulan, dan tahun publikasi setelah nama penulis.
- Masukkan nama sumber berita (Bisnis.com).
- Masukkan link situs web dari berita tersebut.

b. Penulis merupakan institusi

World Health Organization. (2018, 24 Mei). The top 10 causes of death. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death>

- Kutipan dalam kurung: (World Health Organization, 2018)
- Kutipan naratif: World Health Organization (2018)

8. Majalah

a. Majalah yang mempunyai volume dan nomor

Lyons, D. (2009, June 15). Don't 'iTune' us: It's geeks versus writers. Guess who's winning. *Newsweek*, 153(24), 27.

b. Majalah online yang tidak mempunyai volume dan nomor

Schulman, M. (2019, September 9). Superfans: A love story. *The New Yorker*. <https://www.newyorker.com/magazine/2019/09/16/superfans-a-love-story>

- Kutipan dalam kurung: (Lyons, 2009; Schulman, 2019)
- Kutipan naratif: Lyons (2009) dan Schulman (2019)

Dokumen tambahan yang dibutuhkan:

1. Surat Pernyataan Clearance Ethics
2. Surat Pernyataan Kontribusi Karya Tulis Ilmiah

Dokumen tersebut terpisah dengan naskah KTI (karya tulis ilmiah) dan wajib diunggah/upload bersama dengan naskah KTI pada *Open Journal System (OJS)* yang ditambahkan di bagian **Supplementary File** (berbeda bagian dengan **unggah/upload** naskah).

JIKA DITEMUKAN HAL-HAL YANG TIDAK JELAS PADA PANDUAN INI, DAPAT DITANYAKAN MELALUI EMAIL: kebijakan.bosek@gmail.com atau Layanan Jurnal BBRSEKP +62 813-1427-8709.



BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN

Gedung BRSDM KP Lt. 3
Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara
Telp. (021) 6471 1583, Faks.(021) 64700924
Web : <https://kkp.go.id/brsdm/sosek>
email : kebijakan.asek@gmail.com

ISSN **2089-6980**



9 772089 698058